

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirin, Tatang M, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budhijanto, Danrivanto, 2017, *Revolusi Cyber Law Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Refika Aditama, Bandung.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press. Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2004, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Djafar, Wahyudi, M. Jodi Santoso, 2019, *Perlindungan Data Pribadi: Mengenali Hak-Hak Subjek Data, serta Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Depok.
- Ekotama, Suryono, Harum Pujiyanto, Widiartana G, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan : Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Haristya, Sherly, Shita Laksmi, An Nisa Tri Astuti, Intan Fatma Dewi, 2020, *Studi Pendahuluan: Perbandingan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Konvensi Eropa 108+ dan GDPR*, Tifa Foundation, Jakarta.

Hikmawati, Fenti, 2020, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang P.A.F, C.D. Samosir, 2011, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung.

Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia*, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbitan Undip, Semarang.

Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Napitupulu, Sarwin Kiko, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, dan Aryanti Dwi Rachmawati, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung.

- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Setiani, Lies, 2017, *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, R, R. Tjitrosudibyo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudaryono, 2012, *Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2019, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soetoto, Erwin Oman Hermansyah, Zulfikli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, 2022, *Buku Ajar Viktimologi*, Madza Media, Malang.
- Sughandi, R, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabet, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan*, Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Rasyid, Muhammad, Sustira Dirga, dan Yenny Silvia, 2020, *Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online*, LBH Jakarta, Jakarta.
- Rubai, Masruchin 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, hlm. 72.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Asosiasi Fintech Indonesia, 2021, *Kode Etik terkait Pelindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Data di Sektor Teknologi Finansial*, Asosiasi Fintech Indonesia, Jakarta.
- Tim Privacy International, 2018, *The Keys Data to Protection*, Privacy International, London.
- Wahid, Abdul, Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wardhana, Adhitya, I Dewa Ayu Agung Tantri Pramawati, A. We Tenri Fatimah Singkeruang, Ratih Pratiwi, Retno Kusumaningrum, Hasan, Amna, Candra Wijayangka, Christina Yanita Setyawati, Budi Rustandi Kartawinata, Fadliyani Nawir, Tieka Trikartika Gustyana, 2022, *Fintech Innovation: Essense, Position & Strategy, Media Sains Indonesia*, Bandung.
- Widiartana, 2014, *Viktimologi : Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta.
- Widyadharma, IGN. Ridwan, 2010, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

Budijanto, Oki Wahju, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin", *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, Vol. 16, No. 4, Desember 2016.

Fadhly, Fabian, "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Produk Cacat", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2014.

Falihah, Lilis, Rezkyta Pasca Abrini, Evelyn Putri Paraya, "Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 22, September 2022.

Fauzi, Suyogi Imam, Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018.

Gegan, Susan E., Nicholas Ernesto Rodriguez, "Victims' Roles in the Criminal Justice System: A Fallacy of Victim Empowerment?", *Saint John's Journal of Legal Commentary*, Vol. 8, No. 1, 1992.

Habibah, Astrid Faidlatul, Irwansyah, "Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru", *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022.

Hadiyati, Nur, Hayllen Stathany, "Analisis Undang-Undang ITE berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, Desember 2021.

Hariyanto, "Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, Maret 2021.

Hartanto, Ratna, Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No.2, Mei 2018.

Hermawan, Risma Dewi, Aris Prio Agus Santoso, Kresna Agung Yudhianto, "Upaya Polri Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Ilegal di Surakarta", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 4, No. 1, April 2023.

Hutapea, Sintong Arion, "*Right to be Forgotten* sebagai Bentuk Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi", *Jurnal Jurisprudencia HAM dan Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni 2021.

- Iman, Nofie, “Memahami Dinamika Tekfin di Indonesia (Understanding the Dynamics of Fintech in Indonesia)”, *Social Science Research Network*, Agustus 2018.
- Juniasih, Ni Putu, Gde Made Swardhana, “Tinjauan Yuridis Penggunaan *Financial Technology Illegal* pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 12, Desember 2022.
- Kurnia, Novi, Santi Indra Astuti, “Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra”, *Jurnal Informasi*, Vol. 47, No. 2, 2017.
- Lugianto, Adil, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43. No. 4, 2014.
- Marginingsih, Ratnawaty, “*Financial Technology (Fintech)* dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1, April 2021.
- Mulyadi, Dudung, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 2, September 2017.
- Mulyadi, Lilik, “Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung RI”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2012.
- Miszuarty, “Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”, *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No. 1, April 2019.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Jessica, Corris Winar, Andriaman, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 3, September 2020.
- Pratowo, RB Budi, “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 3, Juli 2006.

Polito, Karyn Ellen, "The Rights of Crime Victims in the Criminal Justice System: Is Justice Blind to the Victims of Crime?", *New England Journal on Criminal and Civil Confinement*, Vol. 16, No. 2, 1990.

Qinvi Nada Ulya, Henry Darmawan Hutagaul, "Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Pinjaman Online Di Google Play Store", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9, No.4, Juli 2022.

Rahayu, 2021, *Perempuan dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan, dan Arah Pemberdayaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Romanna Tampubolon, Heryucha, "Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, Maret 2019.

Salvasani, Alifia, Munawar Kholil, "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi pada OJK Jakarta Pusat)", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2020.

Santi, Ernama, Budiharto & Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, Juli 2017.

Sasmitha, Putu Diah Wiska, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamia, "Efektivitas Cyber Patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3, September 2022.

Siburian, Riskyanti Juniver, "Pembaharuan Mekanisme dan Mekanisme dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana", *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 2, Februari 2022.

Siregar, Syawal Amry, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang, *Jurnal Rectum*, Vol.3, No. 1, Januari 2021.

Sitompul, Meline Gerarita, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.

Sophia, Maharani Siti, "Aksesibilitas Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Perlindungan*, Vol. 1, No. 4, November 2014.

- Suryono, Ryan Randy, Indra Budi, Betty Purwandari, “*Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia*”, *Journal Heliyon*, Vol. 7, No. 4, April 2021.
- Tatawi, Marnex L, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)”, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 7, Agustus 2015.
- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas, “Problematisa Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas *Equality Before The Law* (Problematic Provision Of Legal Assistance Structural And Non-Structural Relation To The Basis Of Equality Before The Law)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, November 2020.
- Tsamara, Nadiah, Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021.
- Walker, George, “Financial Technolgy Law-A New Beginning and A New Future”, *The International Lawyer*, Vol. 50, No. 1, 2017.
- Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007.
- Warren, Samuel D., Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy”, *Harvard Law Review*, Vol. 4, No. 5, Desember 1980.
- Westin, Alan F, “Privacy and Freedom”, *Washington and Lee Law Review*, Vol. 25, No. 1, Januari 1968.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Christine Amajuoyi, Ugochi, 2016, Online Peer to Peer Lending Regulation: Justification, Classification and Remit in UK Law, *Thesis*, University of Exeter, United Kingdom.
- Hanifawati, Saida Dita, 2021, Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer to Peer Lending Fintech Ilegal* dan Perlindungan Data Pribadi, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Marisa, Tiara, 2018, Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Priyonggojati, Agus, 2019, Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam *Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*, Tesis, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Sari, Alfhica Rezita, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Rohmah, Hesti Zahrona Nurul, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer to peer lending*) pada *platform* Koinworks.Com dan Investree.Id., *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Al Ayyubi, Sholahuddin, “Berantas Pinjol Ilegal, Bareskrim Polri Bentuk Dua Tim Khusus”, <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454873/berantas-pinjol-ilegal-bareskrim-polri-bentuk-dua-tim-khusus>, diakses pada 16 Februari 2023.

Annur, Cindy Mutia, “DKI Jakarta Kuasai Lebih dari 65% Penyaluran Pinjol Nasional pada Desember 2022”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/30/dki-jakarta-kuasai-lebih-dari-65-penyalaran-pinjol-nasional-pada-desember-2022>, diakses pada 1 Februari 2023.

Anugerah, Pijar, “Pinjaman online: 'Bagaimana saya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi'”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-5704658>, diakses pada 9 Januari 2023.

Anugrahadi, Adi, “Polisi Ungkap Perusahaan Pinjaman Online Legal Menaungi Pinjaman Online Ilegal”, <https://www.liputan6.com/news/read/4691514/polisi-ungkap-perusahaan-pinjaman-online-legal-menaungi-pinjol-ilegal>, diakses pada 3 Februari 2023.

CNN Indonesia, “Rp20,67 T Pinjaman Online Mengalir ke Masyarakat per Juni 2022”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220804180327-78-830452/rp2067-t-pinjaman-online-mengalir-ke-masyarakat-per-juni->

2022#:~:text=OJK%20mencatat%20total%20pengguna%20pinjol,71%20ribu%20rekening%20pemberi%20pinjaman, diakses pada 27 November 2022.

CNN Indonesia, “Temuan OJK: Banyak Orang Pakai Pinjol untuk Beli Tiket Konser dan Baju:,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230705111937-78-969686/temuan-ojk-banyak-orang-pakai-pinjol-untuk-beli-tiket-konser-dan-baju>, diakses pada 7 Juli 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat, “Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi,” <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200305-121009-3116.pdf>, diakses pada 13 Mei 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “UU PPSK Bertujuan Atasi Masalah Sektor Keuangan,” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42452/t/UU+PPSK+Bertujuan+Atasi+Masalah+Sektor+Keuangan>, diakses pada 20 Juni 2023.

Fauzia, Mutia, “Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, dan Untung Ruginya,” <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya?page=all>, diakses pada 6 Januari 2023.

Ismail, Ibnu, “Financial Technology: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya Untuk Masyarakat,” <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/fintech-adalah/>, diakses pada 30 November 2020.

Hapsari, Mita Amalia, “LBH Jakarta Catat Sedikitnya 6 Orang Bunuh Diri karena Terjerat Pinjol,” <https://kmp.im/plus6https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/12/19570871/lbh-jakarta-catat-sedikitnya-6-orang-bunuh-diri-karena-terjerat-pinjol?page=all>, diakses pada 1 Februari 2023.

Hidayat, Rofiq, “Ingat! Praktik Pinjol Ilegal Bisa Dijerat Dua Pasal Ini,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingat-praktik-pinjol-ilegal-bisa-dijerat-dua-pasal-ini-lt616d172bebfa9/>, diakses pada 9 Januari 2023.

Ihsan, Dian, “Profesor Unair Soroti Fenomena Pinjol di Masyarakat,” <https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/13/134100071/profesor-unair-soroti-fenomena-pinjol-di-masyarakat?page=all>, diakses pada 27 Agustus 2022.

Jannah, Lina Miftahul, “UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya”, <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>, diakses pada 10 Mei 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Fintech Lending Langgar Aturan Lakukan Persekusi Digital”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending-langgar-aturan-lakukan-persekusi-digital/0/sorotan_media, diakses pada 9 Januari 2023.

Kompas.com, “Tak perlu ke Mabes Polri, masyarakat bisa laporkan pinjol ilegal ke Polres dan Polda”, <https://nasional.kontan.co.id/news/tak-perlu-ke-mabes-polri-masyarakat-bisa-laporkan-pinjol-ilegal-ke-polres-dan-polda>, diakses pada 16 Februari 2023.

LBH Jakarta, “Banyak Masalah, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online”, <https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban-pinjaman-online/>, diakses pada 7 Maret 2023.

Marhaenjati, Bayu, “Korban Pinjol Jangan Ragu Ajukan Perlindungan di LPSK”, <https://www.beritasatu.com/news/844211/korban-pinjol-jangan-ragu-ajukan-perlindungan-di-lpsk>, diakses pada 7 Maret 2023.

Meilani, Ameliya Tri, “LPSK Dorong Korban Pinjol Tidak Enggan Melapor dan Minta Perlindungan”, <https://www.antaranews.com/berita/2669801/lpsk-dorong-korban-pinjol-tidak-enggan-melapor-dan-minta-perlindungan>, diakses pada 7 Maret 2023.

Nahda, Catherine Rahel, “Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/27/15371241/polri-siapkan-hotline-untuk-laporkan-pinjol-ilegal-nomor-wa-responsif-saat?page=all>, diakses pada 16 Februari 2023.

Novia, Fitri Heriani, “Pinjaman Online Dominasi Aduan Konsumen ke YLKI Sepanjang 2022” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-online-dominasi-aduan-konsumen-ke-ylki-sepanjang-2022-lt63d33e3d7af41/>, diakses pada 1 Februari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Pahami Perjanjian Fintech dan Hal Ini Sebelum Memanfaatkan Fintech Pendanaan Bersama!”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40775>, diakses pada 7 Januari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Tegaskan Bakal Perketat Penerbitan Izin Fintech Pinjaman Online”, <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20514>, diakses pada 7 Januari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx>, diakses pada 11 Januari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Ciri-Ciri Penipuan di Industri Fintech”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10462>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Satuan Tugas Waspada Investasi”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/117>, diakses pada 1 Februari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 18 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan Tutup 105 Pinjaman Online Ilegal”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-18-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-Tutup-105-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>, diakses pada 1 Februari 2023.

Oxford English Dictionary, “Definition of Fintech Noun from The Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fintech?q=fintech>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi”, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>, diakses pada 16 Februari 2023.

Pangesti, Nindy Nurry, “Pantas Disebut Rentenir Online! Ini Contoh Iming-Iming Pinjaman Online Ilegal saat Menjerat Korban”, <https://fame.grid.id/read/463592895/pantas-disebut-rentenir-online-ini-contoh-iming-iming-pinjol-ilegal-saat-menjerat-korban?page=all>, diakses pada 30 Januari 2023.

Rahardyan, Aziz, “Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat”, <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan->

pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat, diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

Rahardyan, Aziz, “Peminjam di Fintech Lending Naik 68 Persen di 2021”, <https://finansial.bisnis.com/read/20220121/563/1491788/peminjam-di-fintech-lending-naik-68-persen-di-2021#>, diakses pada 27 November 2022.

Rizki, Mochamad Januar, “Risiko Menunggak Utang dan Strategi Lepas Jeratan Pinjol Illegal”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-menunggak-utang-dan-strategi-lepas-jeratan-pinjol-ilegal-lt63731b1600f99/?page=all>, diakses pada 30 Januari 2023.

Team Money+, “4 Risiko Gagal Bayar Pinjol OJK, Jangan Coba-Coba ya!”, <https://blog.amartha.com/4-risiko-gagal-bayar-pinjol-ojk-jangan-coba-coba-ya/>, diakses pada 30 Januari 2023.

Ties, “Awat Penipuan Atas Nama P2P Lending, Begini Modus dan Tips Menghindarinya”, <https://jogjaaja.com/read/awat-penipuan-atas-nama-p-2-p-lending-begini-modus-dan-tips-menghindarinya>, diakses pada 7 Januari 2023.

Tim Detikcom, “Pinjol Legal Menagih dengan Meneror, Apakah juga Bisa Dipidanakan?”, <https://news.detik.com/berita/d-5848702/pinjol-legal-menagih-dengan-meneror-apaakah-juga-bisa-dipidanakan?single=1>, diakses pada 3 Februari 2023.

Tim Liputan6.com, “Terjerat Pinjol Ilegal? Jangan Malu Lapor Polisi”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5157795/terjerat-pinjol-ilegal-jangan-malu-lapor-polisi>, diakses pada 30 April 2023.

Triadinata, Firman, “Pinjam Uang Gak Perlu Bayar, Berikut Daftar Pinjol Ilegal 2023”, <https://bengkuluekspress.disway.id/read/141592/pinjam-uang-gak-perlu-bayar-berikut-daftar-pinjol-ilegal-2023>, diakses pada 1 Februari 2023.

Wijaya, Reynold, “P2P Lending sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan”, <https://money.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sbagai.wujud.baru.inklu%20si.keuangan>, diakses pada 6 Januari 2023.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 Permohonan Perlindungan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.05/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor / SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ("AFPI") Nomor 002/SK/COC/INT/V/2020 tentang Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020.

Perjanjian Kerja Sama Nomor: PRJ-1/MS.6/2022 tentang Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Brt.